

I

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: /

TAHUN 2008

Ada Apa dengan Listrik Kita?

Oleh
HERMAN DARNEL IBRAHIM

Pengamat masalah energi
dan ketenagalistrikan

Sejak beberapa tahun terakhir terjadi kekurangan daya listrik di beberapa daerah. Walaupun Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah ada program untuk mengatasi, namun belum dapat dipastikan apakah krisis tersebut akan segera berakhir.

Terjadinya kekurangan daya listrik sejak beberapa tahun terakhir mungkin tak dapat dipisahkan dari beberapa peristiwa. *Pertama*, krisis moneter tahun 1998 yang mengakibatkan

PLN mendadak mengalami "koma". Biaya produksi meningkat beberapa kali lipat (besarnya komponen valuta asing), sementara tarif listrik baru dinaikkan pada 2003.

Kedua, lahirnya UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan yang melepaskan posisi PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Sesuai semangat otonomi daerah, tanggung jawab mengatasi kekurangan daya dalam UU tersebut ada pada pemerintah daerah.

Ketiga, kenaikan harga BBM pada 2005 menyusul kebijakan dihapuskannya subsidi BBM untuk industri, memperberat beban PLN yang baru saja siuman dari "koma",

karena masih banyak pembangkit yang mengandalkan BBM. Di sisi lain, membuat PLN pada posisi yang dilematis dalam mengatasi krisis. Sebab, yang paling mudah dan cepat dilakukan adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang digerakkan BBM, namun biayanya mahal.

Dalam usaha tenaga listrik, terjadinya krisis dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu kurangnya kapasitas sarana pembangkit dan jaringan sehingga tidak mencukupi untuk operasi yang andal, gangguan atau kerusakan tak terduga pada sarana ketenagalistrikan seperti akibat bencana

alam, serta terganggunya pasokan energi primer pada sebagian pembangkit.

Krisis penyediaan listrik di Sumut, Sumatera bagian Selatan, Kalbar, Kaltim, dan sebagian Sulawesi sejak beberapa waktu lalu, serta beberapa gangguan pasokan di Jawa-Bali akhir-akhir ini, semuanya berkaitan dengan kurangnya kapasitas sarana, yang ditandai dengan margin cadangan pembangkit yang sudah minim. Kurangnya kapasitas sarana tersebut terjadi karena tidak terlaksananya pembangunan tambahan sarana sesuai waktu dan kapasitas yang direncanakan.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008

Meneg BUMN: PLN Harus Segera Diaudit

Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, mengatakan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus segera diaudit baik audit teknis maupun audit untuk tujuan yang lebih besar terkait banyaknya pembangkit listrik yang rusak seperti di Cilacap, Jawa Tengah.

"PLN termasuk pembangkit di Cilacap memang harus diaudit baik audit teknis maupun audit untuk tujuan yang lebih besar," katanya.

Audit untuk tujuan yang lebih besar perlu dilakukan dan selama ini audit teknis standar sudah dilakukan. Audit teknis memang telah dilakukan dan telah menjadi wewenang PLN. "Khusus untuk Cilacap memang sudah banyak masalah dari awal," ujar Sofyan.

Terkait sering adanya pemadaman listrik bergilir hal itu disebabkan penggunaan *power* terlalu besar dan pihaknya saat ini sedang membangun *power plane* yang ditargetkan rampung 2009. "Jadi sekarang ini memang tidak cukup *power*, otomatis terjadi pemadaman," tambahnya.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 44

TAHUN 2008

Audit Konsumsi Listrik Menuai Protes

JAKARTA — Rencana pemerintah mengaudit penggunaan listrik pada gedung perkantoran dan tempat usaha dinilai salah sasaran. Audit seharusnya dilakukan terhadap manajemen PT PLN, bukan konsumen listrik.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan audit penggunaan listrik pada gedung perkantoran dan tempat usaha akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Iklim investasi di Indonesia menjadi tidak kompetitif buat investor. "Risikonya, tidak ada investor yang datang," ujarnya. "Jangan dibalik-balik, PLN yang seharusnya diaudit, bukan konsumen."

Menurut ahli kelistrikan Soetjipto Soewono, rencana audit terhadap konsumen juga menyalahi perjanjian jual-beli listrik. Dalam perjanjian antara konsumen dan PLN disebutkan, perusahaan milik negara ini berkewajiban menyediakan listrik. "Sedangkan konsumen berkewajiban membayar tagihan listrik," katanya. Karena itu, jika tak mampu menyediakan listrik, PLN wajib memberikan kompensasi kepada konsumen.

Lagi pula, Soetjipto menegaskan, krisis listrik tidak akan terjadi jika manajemen PLN memelihara pembangkit sesuai dengan rencana. "Mengapa sampai ada kerusakan pembangkit," ujarnya, "ini yang harus diaudit."

Ia juga mengatakan daya mampu neto pembangkit di Jawa-Bali sekitar 20 ribu megawatt, sedangkan beban puncak neto hanya 16 ribu megawatt. Jadi seharusnya masih ada cadangan sekitar 26 persen atau 4.000 megawatt. "Itu cukup aman untuk pasokan listrik," dia mengungkapkan.

Suara senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Advokasi Konsumen Listrik Indonesia Yunan Lubis. Ia meminta dilakukan audit terhadap semua pembangkit dan subsidi listrik yang diberikan kepada PLN.

Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Tutum Rahanta juga tak sepenuhnya sepakat dengan rencana audit. "Pemilik gedung swasta sudah menggunakan teknologi untuk menghemat listrik," ujarnya. Karena itu, yang seharusnya dilakukan adalah audit teknologi, bukan konsumsi listrik. ● ALI NUR YASIN | AMIRULLAH | YULIAWATI

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2008

Waduk Mengkhawatirkan

Pasokan Listrik untuk Sistem Jawa-Bali Berkurang

GROBOGAN, KOMPAS — Kondisi Waduk Kedungombo dan Rawapening di Jawa Tengah mengkhawatirkan.

Sebulan ini ketinggian air Waduk Kedungombo turun 10 sentimeter per hari. Bahkan, Waduk Rawapening kritis karena ketinggian air lebih rendah 0,5 meter dari ambang kebutuhan.

Waduk Kedungombo berada di Kabupaten Grobogan dan Waduk Rawapening di Kabupaten Semarang.

Kepala Unit Waduk Kedungombo Bambang Harijanto, Senin (30/6), mengatakan, agar mencukupi kebutuhan air minum, pada 15 Juli pasokan air untuk lahan pertanian akan dihentikan. Para petani diminta tidak menanam tanaman yang membutuhkan banyak air.

Berkurangnya ketinggian air Waduk Kedungombo terlihat dari kemunculan lahan pasang surut di pinggiran waduk, baik di Sra-

gen, Grobogan, maupun Boyolali. Lahan itu kini dimanfaatkan petani untuk menanam jagung.

Juwari (60), petani Desa Bulakrejo, Kecamatan Sumberawang, Kabupaten Sragen, menanam jagung di lahan pasang surut perbatasan Kabupaten Grobogan-Sragen.

Pasokan listrik

Sementara itu, kritisnya Rawapening menyebabkan produksi Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok dan Timo di Kabupaten Semarang turun 50 persen lebih. Penurunan terlihat di penam-

pungan air Candi Dukuh ataupun Jelok, Kabupaten Semarang, Senin. Elevasi di Candi Dukuh adalah 461,91 meter dari permukaan laut, sedangkan di Jelok 461,51 meter. Adapun batas kebutuhan minimal adalah 462,27 meter.

"Kami terpaksa mengurangi aliran air ke PLTA Jelok dan Timo," kata Koordinator Satuan Kerja Rawapening, Balai Pengelola Sumber Daya Air, Jragung Tuntang Kuristiyanto.

Pengawas Senior Subunit PLTA Jelok dan Timo PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Mrica Bibit Sugiyono, secara terpisah, menuturkan, saat ini PLTA Jelok hanya bisa menghasilkan 7 megawatt (MW) listrik, turun dari biasanya 15 MW. Produksi PLTA Timo juga turun dari 12 MW menjadi 7 MW. Penurunan ini berdampak luas karena pasokan listrik kedua PLTA itu terkait sistem listrik Jawa-Bali.

Air Rawapening juga untuk

mengairi 20.000 hektar sawah di Kabupaten Semarang

Gubernur Jateng Ali Mufiz di Kudus, Senin, menyatakan, memasuki awal Juli, 24 dari 35 kabupaten/kota di Jateng rawan kekeringan, baik air minum maupun irigasi. Sejauh ini kekeringan parah terjadi di Kabupaten Rembang, Sragen, dan Semarang.

Debit dam Kali Kotok di Jember, Jawa Timur, berkurang 50 persen. Karena itu, petani dianjurkan menanam palawija yang tidak terlalu perlu air. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Gabungan Himpunan Pemakai Air Dam Kali Kotok H Muhammad Rais di Jember, Senin.

Di Gunung Kidul, DI Yogyakarta, petani menanam singkong pada musim kemarau sehingga tidak ada gagal panen. Sebaliknya, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 20 hektar tanaman padi gagal dipanen.

(HEN/GAL/SIR/SUP/WKM/NIT)

4

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI <u>JUN</u> JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 <u>30</u> 31 HALAMAN : 15		
TAHUN 2008		

Pembangkit Lama dan Baru, Sama-sama Tak Bisa Bangkit

Pemadaman listrik di Jawa-Bali, yang semakin sering dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak awal 2008, tidak terlepas dari ketidakandalan pembangkit-pembangkit yang ada. Untuk pembangkit yang sudah dioperasikan puluhan tahun, seperti PLTU Suralaya, kondisi tersebut lumrah. Tetapi, untuk pembangkit baru yang pengoperasiannya belum genap tiga tahun, seperti PLTU Cilacap, tentu menjadi janggal.

Pasokan listrik wilayah Jawa-Bali ditopang oleh sistem interkoneksi sehingga bila ada satu atau beberapa pembangkit mengalami gangguan dan harus berhenti beroperasi, masih bisa mengandalkan dari pembangkit lain. Dengan sistem interkoneksi semestinya tidak perlu ada pemadaman bergilir, bila hanya ada satu pembangkit yang rusak, seperti yang terjadi saat ini.

PLN tidak menjelaskan ada pembangkit listrik selain PLTU Cilacap yang berhenti operasi. Artinya, Jawa-Bali seharusnya hanya kekurangan pasokan listrik tidak lebih dari 300 MW.

PLTU Cilacap memiliki dua unit pembangkit, masing-masing dirancang berkapasitas 300 MW. Namun, sejak dioperasikan pertengahan 2006, produksi PLTU Cilacap tidak bisa optimal. Bahkan, pembangkit yang sebagian besar sahamnya dimiliki swasta itu, kerap kali dihentikan operasinya, karena masalah bahan bakar atau karena kerusakan mesin.

Gangguan di PLTU

Cilacap sudah tak terhitung lagi sejak pembangkit itu diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, November 2006. Bahkan, sebelum pembangkit mulai dioperasikan secara komersial pada Februari 2006, kerusakan sudah sering terjadi.

PLTU Cilacap dibangun oleh Chengda Engineering Corporation of China, dengan biaya US\$ 510 juta. Pembangkit ini dikelola swasta, yakni PT Sumber Segara Primadaya. PLN memiliki saham 40 persen di PLTU Cilacap, melalui anak perusahaannya PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Pengamat ketenagalistrikan Nengah Sudja mengatakan, PLTU Cilacap merupakan contoh bahwa pembangunan pembangkit listrik di Indonesia masih berorientasi pada proyek.

"Sehingga pembangunan pembangkit itu bisa selesai dalam waktu 24 bulan. Padahal setidaknya perlu waktu paling cepat empat tahun untuk membangun PLTU dengan kapasitas 300 MW ke atas. Lalu, mengapa PLTU Cilacap didesain dengan kapasitas 2x300 MW? Bukankah lebih efisien jika membangun (satu unit) PLTU kapasitas 600 MW? Hal seperti itu, juga masalah sering rusaknya PLTU Cilacap tidak pernah dijelaskan secara transparan oleh PLN. Pemerintah harus mengaudit, karena bagaimanapun kerusakan di PLTU Cilacap telah berdampak pada pemadaman bergilir yang pasti merugikan masyarakat," katanya.

Semula, PLTU Cilacap di-

Pembangkit Listrik yang Diandalkan di Sistem Jawa-Bali



Sumber:

PILIPUS

gadang-gadang oleh PLN dan pemerintah bakal menjadi contoh proyek listrik kemitraan yang murah, dan bisa dirampungkan jauh lebih cepat dibanding pembangunan PLTU pada umumnya. Harga listrik PLTU Cilacap sekitar US\$ 4,7 sen per kWh, juga lebih kompetitif dibanding harga listrik yang dihasilkan PLTU lain yang mencapai US\$ 9,5 per kWh.

Sayang, dengan berbagai kelebihan tersebut, PLTU Cilacap justru tak bisa membuktikan keunggulannya. Sejak 24 Juni lalu, PLTU Cilacap terpaksa harus dihentikan operasinya.

Seorang wakil dari PT Sumber Segara Primadaya, yang enggan menyebutkan namanya, melalui pesan singkat kepada SP membantah bila terhentinya produksi PLTU Cilacap karena kerusakan mesin. Meski tidak secara jelas menyebutkan pembangkit berhenti operasi karena kehabisan batu bara, menurut dia, PLTU Cilacap

kembali masuk ke sistem Jawa-Bali pada 29 Juni, sesuai rencana masuknya batu bara pada tanggal 28-30 Juni.

Mestinya Aman

Pengamat ketenagalistrikan dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, tanpa PLTU Cilacap, mestinya pasokan listrik Jawa-Bali masih aman. Kecuali ada pembangkit lain yang juga rusak atau pembangkit-pembangkit yang beroperasi tidak optimal. Bila kondisinya demikian, Fabby mengaku tak heran.

"Karena kondisi pembangkit-pembangkit buruk. Pemeliharaan atau perawatan pembangkit yang menghabiskan biaya mahal, sia-sia, karena yang terjadi sekarang justru pembangkit sering rusak," katanya.

Wilayah Jawa dan Bali memiliki setidaknya 218 unit pembangkit. Kapasitas terpasang pembangkit di sistem Jawa-Bali saat ini sekitar 23.150 MW. Namun, kemam-

puan pasok diperkirakan sekitar 18.500 MW. Kemudian, karena setiap bulan setidaknya ada 14 unit pembangkit yang menjalani perawatan rutin sehingga harus dimatikan, pasokan yang tersedia hanya sekitar 16.300 MW.

Berdasarkan data PT Pembangkitan Jawa-Bali, beban puncak yang tertinggi mencapai 16.251 MW, terjadi pada November 2007. Sejak Desember 2007, rata-rata beban puncak sebesar 15.400-15.600 MW. Normalnya, beban puncak hanya sekitar 14.800 MW.

Meskipun cadangan daya terhitung cukup, mengingat hampir semua unit pembangkit diragukan keandalannya, pasokan listrik Jawa-Bali pun sering kurang. Pemadaman listrik secara tiba-tiba, karena kerusakan yang tak terduga, masih sulit diminimalkan. Padahal, PLN mengaku seluruh pembangkit menjalani pemeliharaan berkala untuk menjaga keandalan mesin.

"Pemadaman secara tiba-tiba bisa terjadi. Apalagi, be-

ban puncak sudah lebih tinggi dari yang diperkirakan. Kami sudah menyampaikan kondisi kelistrikan yang seperti ini kepada konsumen, terutama konsumen besar (industri)," kata Direktur PT PLN Jawa-Bali Murtaqi Syamsuddin.

Kekurangan daya pasok sehingga harus dilakukan pemadaman bergilir, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penurunan produksi di pembangkit baik milik PLN maupun swasta, beban puncak meningkat karena pemakaian listrik naik, atau karena terendatnya pasokan bahan bakar ke pembangkit. Bahan bakar tidak hanya BBM, tetapi juga batu bara dan gas alam.

Sebagian besar pembangkit listrik di Jawa-Bali masih dioperasikan dengan BBM. PLTGU Muara Karang, PLTGU Tanjung Priok, PLTGU Muara Tawar, PLTGU Tambak Lorok, PLTGU Grati, dan PLTGU Cilegon, hingga kini belum mendapat pasokan gas sesuai yang direncanakan. Pembangkit-pembangkit itu, kecuali PLTGU Cilegon, terpaksa dioperasikan dengan BBM agar tidak terhenti produksinya.

PLTGU Cilegon yang beroperasi sejak 2006, hingga kini hanya mampu menghasilkan daya sekitar 70 MW, dari total kapasitas terpasang 740 MW. PLN tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun pasokan gas dari China National Oil Offshore Corp (CNOOC) untuk PLTGU Cilegon tidak juga terpenuhi sesuai kesepakatan.

Muljo Adji yang ketika itu menjabat General Manajer

PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali, mengatakan, selama sekitar dua tahun mesin pembangkit di PLTGU Cilegon menganggur.

Hingga kini, pasokan bahan bakar ke pembangkit masih menjadi masalah yang sulit terpecahkan. Tidak hanya PLN, pemerintah pun seolah kehabisan kata untuk menjawab pertanyaan, mengapa PLTU Cilacap atau PLTU Tanjung Jati B bisa kekurangan batu bara? Atau mengapa PLTGU Muara Karang dan PLTGU Cilegon tidak juga mendapatkan gas sesuai kebutuhan? Juga mengapa BBM ke PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Tanjung Priok sering terlambat pengirimannya? Bukankah dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, masalah tersebut seharusnya tidak ada?

Sebagai cermin untuk melihat kekurangan yang ada, audit menyeluruh terhadap semua pembangkit listrik harus segera dilakukan. Namun, jangan lagi melakukan audit hanya sebagai formalitas. Sebab, audit pembangkit yang pernah dilakukan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi tahun 2003, hingga kini tidak jelas hasil dan manfaatnya.

Audit tersebut menghabiskan uang negara sekitar Rp 14 miliar. Dari jumlah itu Rp 5 miliar untuk menyewakan peralatan dan kelengkapan audit, Rp 5 miliar masuk dalam biaya konsultasi. Sedangkan sekitar Rp 4 miliar, sangat tidak jelas penggunaannya. [SP/Henny A Diana]

5

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : A.8		
TAHUN 2008		

Polisi Diminta Usut Pengadaan Batu Bara

BANJARMASIN — Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin meminta kepolisian mengusut pengadaan batu bara oleh PT PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Asam-Asam. Ia curiga ada yang salah dalam sistem pengadaan batu bara yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergiliran. "Tolong diperiksa, apakah sesuai dengan Keppres 80 (Keputusan Presiden Nomor 80) tentang Pengadaan Barang dan Jasa," kata Rudy setelah melepas kontingen PON XVII provinsinya di Banjarmasin kemarin.

Rudy ragu dengan batu bara yang dibeli PLN untuk PLTU Asam-Asam. Kualitas batu bara juga dicurigai karena seringnya melakukan pemeliharaan. Apalagi PLN beralasan, pemadaman bergilir terpaksa dilakukan menyusul seringnya pemeliharaan PLTU Asam-Asam. "Jangan-jangan kualitasnya rendah sehingga berakibat mempercepat kerusakan mesin pembangkit," ujarnya.

Seharusnya, menurut Rudy, sistem kontrak pembelian batu bara PLN dengan PT Arutmin Indonesia dan PT Jorong Barutama Gresston dilakukan dalam jangka panjang untuk menjamin ketersediaan batu bara sebagai bahan baku, bukan pembelian secara *spot* dengan harga murah. Rudy yakin, jika kualitas batu bara yang dibeli baik, kerusakan mesin pembangkit tak seperti sekarang. "Juga tak menyebabkan pemadaman listrik secara bergiliran," katanya.

Rudy meminta manajemen PLN memperbaiki diri. Ia juga menolak membantu PLN menyewa genset karena tak ada aturan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membantu perusahaan yang cari untung. Menurut dia, pihaknya juga tak mungkin menyewa genset karena mengeluarkan APBD harus dengan alasan yang dianggap mendesak. "Jangan-jangan niat kami membantu PLN malah kami yang diperiksa KPK," ujarnya.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan, Djumaderi Maserun, mengaku akan mengusulkan kepada Dewan untuk mengundang jajaran PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Mereka diminta menjelaskan duduk perkara pemadaman bergilir yang semakin parah di wilayah ini. ● KHAIDIR RAHMAN

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 13		
TAHUN 2008		

PLTG Borang Kini Ditangani BPKP Sofyan Minta Proyek PLN Diaudit Secara Menyeluruh

Jakarta, Probisnis RM.

Proyek-proyek listrik yang dianggap bermasalah segera akan diaudit. Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil menegaskan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus diaudit baik secara teknis maupun audit untuk tujuan yang lebih besar. Ini terkait banyaknya pembangkit listrik yang rusak seperti di Cilacap, Jawa Tengah.

"PLN termasuk pembangkit di Cilacap memang harus diaudit baik audit teknis maupun audit untuk tujuan yang lebih besar,"

katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut Sofyan, audit teknis memang jadi wewenang PLN. "Khusus untuk Cilacap memang sudah banyak masalah sejak dari awal," katanya.

Sementara itu, terkait seringnya pemadaman listrik bergilir, kata Sofyan, hal itu akibat penggunaan power yang terlalu besar. Untuk itu, pihaknya saat ini sedang membangun *power plant* yang ditargetkan rampung 2009.

Dia mengatakan, jalan satu-satunya untuk menghindari pe-

madaman dengan menghemat listrik secara maksimal.

"Saya minta ada iklan-iklan yang terus memasyarakatkan mematikan listrik pada malam hari ketika sudah tidak digunakan," katanya.

Dia meyakinkan, pemadaman listrik tidak akan terjadi lagi pada 2009 menyusul rampungnya program percepatan pembangunan listrik 10.000 megawatt.

Sementara Corporate Secretary PT PLN Ario Subijoko mengatakan, di internal PLN sudah ada audit dan pengawasan. "Di setiap unitnya ada sistem pengawasan internal. Ini masih ditambah dengan audit BPK dan akuntan swasta," ujarnya ketika dihubungi tadi malam.

Namun kalau akan diaudit lagi, menurut dia, itu bisa positif karena akan memberikan pemahaman soal efisiensi PLN.

Sementara itu ketika disinggung soal audit di proyek-proyek PLN bermasalah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Borang, Ario enggan memberikan jawaban secara jelas.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terhadap proyek pengadaan PLTG Borang di Palembang, Sumatera Selatan. ■ DNA

f

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2008

KRISIS LISTRIK INDUSTRI

PLN dan Pengusaha Harus Bicara Secara Bisnis

JAKARTA (Suara Karya): Krisis energi listrik menghambat ekspansi sektor industri pada tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah berharap ada pembicaraan khusus secara bisnis antara kalangan pengusaha dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Kalangan industri meyakini terjadi hambatan dalam ekspansi karena kelangkaan listrik. Tapi hingga saat ini memang masih belum terekam dengan jelas," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (30/6).

Fahmi lantas mencontohkan industri hilir minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan industri lainnya di Sumatera Utara yang hampir setiap hari terkena pemadaman listrik. Selain terhambatnya produksi, proses ekspansi bisnis juga harus ditunda.

"Kalau ini masalahnya, konsep *business to business* harus ditempuh antara PLN dan pengusaha.

Jadi tidak bisa pemerintah ikut campur lagi. Sebab orang sudah tahu keterbatasan listrik PLN karena apa. Jadi bagaimanapun, biar dihukum gantung, direksi dan komisaris PLN tetap tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Skema secara bisnis merupakan pembicaraan antara perusahaan dengan PLN dengan prinsip insentif dan disinsentif. Sehingga pengusaha yang dirugikan pun bisa mendapat kompensasi dari PLN. Begitu pula sebaliknya pengusaha yang boros bisa dikenakan tarif disinsentif.

Di lain pihak, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, PLN harus segera diaudit, baik audit teknis maupun audit untuk tujuan yang lebih besar. Initerkait banyaknya pembangkit listrik yang rusak seperti di Cilacap, Jawa Tengah. "PLN, termasuk pembangkit di Cilacap memang harus diaudit," kata Sofyan.

Audit untuk tujuan yang lebih

besar perlu dilakukan, karena selama ini audit teknis standar sudah selesai dilakukan PLN. "Khusus untuk Cilacap memang sudah banyak masalah dari awal," tuturnya.

Terkait sering adanya pemadaman listrik bergilir, menurut dia, hal itu disebabkan penggunaan energi terlalu besar. Sementara itu pembangkit 10.000 megawatt (MW) berbahan bakar batu bara baru selesai tahun depan. "Jadi sekarang ini memang tidak cukup, otomatis terjadi pemadaman," ujar Sofyan.

Oleh karena itu, jalan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah penghematan listrik. Sebab bila listrik bisa dihemat hingga 500 MW per hari, maka pemadaman bergilir tidak akan ada lagi. "Maka itu saya minta ada iklan-iklan yang terus memasyarakatkan matikan listrik pada malam hari, ketika sudah tidak digunakan," katanya.

Namun, Sofyan menekankan, pemadaman listrik tidak akan ter-

jadi lagi pada 2009 dengan rampungnya program percepatan pembangunan listrik 10.000 MW.

Anggaran Depperin

Di sisi lain, terkait penyerapan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), hingga 16 Juni 2008 Departemen Perindustrian baru melakukan realisasi DIPA sebesar 16,15 persen atau sebesar Rp 309,586 miliar. "Saya akui angka ini jauh dari target yang kami tetapkan yakni realisasi hingga 30 persen pada akhir Juni 2008," ujarnya.

Hal ini disebabkan program restrukturisasi mesin industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih dalam tahap verifikasi. Dan revisi atas perubahan penghematan anggaran Depperin dari 15 persen menjadi 10 persen belum sepenuhnya disetujui Departemen Keuangan. "Kegiatan melalui lelang umum hampir seluruhnya terhambat akibat proses pemotongan tersebut," kata Fahmi lebih lanjut. (Andrian)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 28

TAHUN 2008

Pemadaman bergilir di Riau sampai Agustus

BISNIS INDONESIA

PEKANBARU: Pemadaman listrik bergilir masih terjadi di Provinsi Riau hingga Agustus tahun ini menyusul defisit listrik lebih dari 100 megawatt setiap hari yang belum dapat diatasi oleh PLN.

Kekeringan di sejumlah waduk pembangkit dan kerusakan jaringan interkoneksi dengan daerah lain dituding sebagai penyebab defisit listrik itu.

"Hal ini mengakibatkan defisit energi berkepanjangan di Riau. Hingga Agustus masih berpeluang untuk dilakukan pemadaman bergilir," ujar Tagor Sidjabat, Manajer Operasional PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, kemarin.

Dia menjelaskan sistem interkoneksi dengan Sumatra Barat mengalami gangguan yang diakibatkan oleh rusaknya salah satu unit pembangkit di PLTU Ombilin sehingga hanya mampu memproduksi sebesar 90 megawatt setiap hari. Hingga saat ini kerusakan itu dalam tahap perbaikan.

Menurut dia, seharusnya awal Juni lalu energi listrik dari PLTU Ombilin sudah masuk ke Riau.

Selain itu, imbuh tagor, PLTA Koto Panjang yang biasanya memasok sebesar 50 % beban Pekanbaru mengalami penurunan permukaan air menjadi 72 meter di atas permukaan laut dari keadaan normal sebelumnya 82 meter di atas permukaan laut. Kondisi itu melampaui titik kritis yang seharusnya 76 meter di atas permukaan laut sehingga menyebabkan pem-

bangkit itu tidak mampu beroperasi secara maksimal.

Tagor memaparkan dalam keadaan normal Riau mendapat pasokan energi listrik dari sistem interkoneksi dengan Sumatra Selatan dan Sumatra Barat sebesar 100 megawatt hingga 130 megawatt per hari. "Beban puncak men-

capai 284,5 megawatt sementara daya yang ada sekarang hanya 150 megawatt. Kami masih defisit sekitar 100 megawatt."

Dia mengatakan pemadaman bergilir dilakukan selama dua jam di 18 wilayah di Riau, PLN mampu melakukan pengurangan konsumsi sebanyak 25 megawatt- 30 megawatt setiap hari.

Selain melakukan pemadaman bergilir, sambungnya, PLN juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berhemat dalam

mengonsumsi listrik, terutama untuk kawasan Pekanbaru. Kota itu merupakan kota terboros nomor empat yang mengonsumsi listrik setelah Jakarta, Bangka, dan Balikpapan.

Laju pertumbuhan kebutuhan listrik di Riau mencapai angka 12,67 % dan berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 6%. "Sebesar 14% dari laju pertumbuhan listrik Riau terjadi di Pekanbaru."

Namun, imbuhnya, mengenai pemadaman bergilir tersebut PLN telah memberlakukan sistem tingkat mutu pelayanan kepada pelanggan. Jika pemadaman di suatu daerah mencapai 3x24 jam berturut-turut, akan diberikan kompensasi 10% dari biaya beban rekening listrik seperti yang sudah dilakukan di daerah Sorek dan Kabupaten Siak. (12) (redaksi@bisnis.co.id)

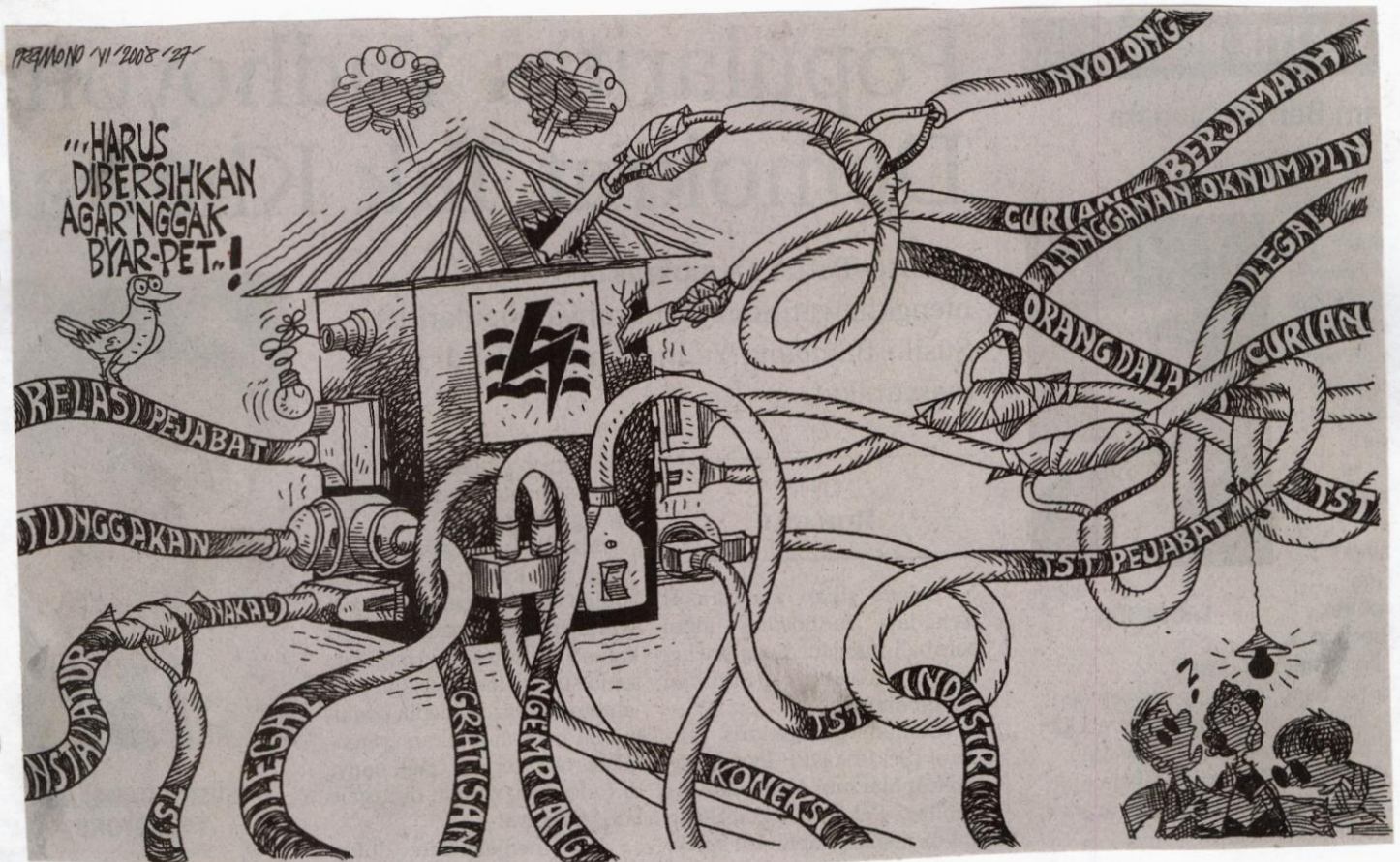
Kondisi listrik Riau (megawatt per hari)	
Kebutuhan normal 100-130	Pasokan 75
Beban puncak 284,5	Pasokan 150
Pemadaman bergilir di Riau	
Kota/kabupaten	Jumlah
Pekanbaru	9 Wilayah
Dumai	5 Wilayah
Rengat	1 Wilayah
Teluk Kuantan	1 Wilayah
Lainnya	1 Wilayah

Sumber : PT PLN Riau dan Kepulauan Riau

BISNIS/FITRIYANA PULUNGAN

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 4		TAHUN 2008



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

TAJUK RENCANA

Kelistrikan yang Memprihatinkan



Kita prihatin betul dengan situasi kelistrikan nasional. Pemadaman secara bergilir berkepanjangan tentu saja akan terasa melelahkan.

Pemadaman yang semakin sering frekuensinya dengan durasi yang semakin panjang bahkan dapat membuat frustrasi kalangan konsumen, baik rumah tangga maupun industri manufaktur dan jasa. Ketergantungan masyarakat modern akan listrik sudah sangat tinggi.

Peralatan vital rumah sakit, rumah tangga, sektor jasa, sampai peralatan berat industri manufaktur bisa rusak jika suplai listrik dari pemasok tunggal, PT PLN, mati hidup, tegangan tidak stabil naik turun.

Bukan saja merusak peralatan, dampak lebih jauh adalah menahan laju proses produksi barang dan jasa yang membutuhkan listrik. Padahal, peningkatan produksi dan produktivitas sangat dibutuhkan dalam menggenjot aktivitas perekonomian. Dinamisasi yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi itulah yang sangat diharapkan terjadi untuk mengatasi persoalan bangsa saat ini, yakni pengangguran dan kemiskinan.

Dalam konteks bertali-temalnya persoalan kekisruhan listrik, perekonomian, dan kehidupan sosial itulah yang menggugah keprihatinan dan perasaan keadilan masyarakat. Setelah ditekan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, lonjakan harga bahan baku, mereka kini mengalami tekanan lain berupa pemadaman listrik.

Apa yang bisa dilakukan masyarakat tanpa aliran listrik yang andal? Penyediaan kelistrikan yang andal itulah problem berat kita saat ini. Padahal, efek berantai suatu sistem kelistrikan yang tangguh sungguh luar biasa dalam memajukan perekonomian. Sebaliknya, efek kerusakan yang ditimbulkan jika sistem kelistrikan keropos juga amat dahsyat.

Pemerintah bukan tidak memikirkan hal itu. Telah dicanangkan program percepatan pengadaan pembangkit listrik berkapasitas 10.000 megawatt yang diharapkan selesai tahun 2009 dan secara riil berfungsi 2010. Ada kemajuan, tetapi belum sesuai harapan.

Kendati selesai sesuai target, proyek itu pun belum tentu dapat seketika mengatasi kelangkaan listrik yang sudah menyebar ke seluruh Nusantara. Faktanya, laju kenaikan konsumsi cenderung lebih tinggi meninggalkan kemampuan pembangunan pembangkit yang memang tidak mudah dan murah. Inilah pangkal persoalan itu.

Dengan potensi masalah listrik yang masih kompleks, kita memintakan perhatian serius dari semua pihak yang terkait. Kesungguhan itu sangat mendesak jika dikaitkan dengan perkembangan global. Misalnya, harga minyak mentah yang cenderung terus melonjak, harga batu bara yang juga tak tertahankan. Dua komoditas itu vital untuk menggerakkan mesin pembangkit listrik.

Tak kalah pentingnya, upaya nyata dan terus-menerus manajemen PT PLN untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Tidak adil jika masyarakat terus-menerus ikut menanggung ketidakefisienan dan salah urus PLN.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : A.2		
TAHUN 2008		

MENARA LISTRIK ROBOH Banten Selatan Lumpuh

"Ada yang mencuri baut
besi penyangga."

PANDEGLANG — Aktivitas kehidupan di kawasan Banten Selatan sejak Sabtu malam hingga Ahad petang lalu lumpuh akibat padamnya listrik. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak itu tak ubahnya kota mati.

Pemadaman listrik itu karena menara saluran utama tegangan ekstratinggi 70 KV di tiang D.84 roboh pada Jumat lalu. Diduga menara itu roboh karena ada yang sengaja membuka mur dan baut besi penyangga.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pandeglang Ajun Komisaris Yusup Rahmanto, berdasarkan hasil pemerik-

saan polisi, ada yang sengaja membuka mur itu. Polisi menduga motif pelakunya adalah pencurian.

Tak ada korban dalam kejadian itu lantaran lokasi menara tersebut di tengah hutan milik Perhutani di Kampung Geger, Desa Pasir Karang, Kecamatan Koroncang, Pandeglang.

Juru bicara PLN Area Pelayanan dan Jaringan Banten, Bambang Susila, memastikan robohnya menara itu mengakibatkan sejumlah gardu induk mati, antara lain gardu Seketi, Menes, dan Rangkasbitung. "Sejauh ini kami terus melakukan perbaikan dalam 2 x 24 jam," ujarnya.

Tak hanya itu, PLN juga membangun menara darurat untuk meng-

alirkan listrik di Banten Selatan tersebut. Ia tak bisa memastikan kapan menara itu selesai dibangun karena membutuhkan perbaikan yang cukup berat.

Menurut Asisten Manajer Distribusi PLN Banten Agus Suryana, kondisi geografis menara yang jauh dari jalan mengakibatkan lambatnya penanganan. "Insya Allah tower darurat bisa dioperasikan malam ini (kemarin)," kata dia. Adapun perbaikan menara utama diharapkan selesai dalam tujuh hari.

Pemadaman listrik itu sangat dikeluhkan warga. Banyak yang tak mengetahui apa yang menjadi penyebab pemadaman itu.

Banyak pusat belanja yang terpaksa memasang genset untuk tetap menjalankan aktivitas bisnis. Beberapa klinik yang menggunakan aliran listrik terpaksa harus menggunakan cara manual untuk menjalankan aktivitas.

Sejumlah toko, kios, dan gerai fotokopi juga tutup. Bukan hanya itu, sejumlah orang di wilayah tersebut mengeluhkan padamnya listrik karena berakibat pada terputusnya komunikasi mereka. Di Malimping, warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena alat pompa ikut mati. "Untuk wudu salat aja susah," ujar Muhyidin, warga setempat. ● MABSUTI IBNU MARHAS

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : //

TAHUN 2008

Pengusaha Kecil Desak PLN Segera Beri Kompensasi

[JAKARTA] Pemadaman listrik bergilir di Jabotabek merugikan masyarakat. Namun, hingga kini belum ada kejelasan apakah PLN akan memberikan kompensasi bagi masyarakat, termasuk pengusaha kecil yang dirugikan ratusan juta rupiah.

Sejumlah pengusaha kecil dan menengah di Tangerang dan Bogor mengeluhkan pemadaman listrik yang tiba-tiba sehingga usaha mereka merugi.

Hamsyar, pengusaha koneksi pakaian sekolah di Jl Irigasi Kampung Gunung, Cipondoh, Kota Tangerang, kepada SP, Sabtu (27) mengatakan, pemadaman listrik yang tiba-tiba membuat usaha mereka merugi. Apalagi saat ini sedang ramai-ramainya pesanan.

"Kemarin listrik mati hari Jumat, padahal kita harus setor pesanan Sabtu. Saya sampai stress karena selain pesanan terlambat," katanya.

Menurut Hamsyar, kalau pesanan telat dipenuhi, berarti uang yang masuk juga tertunda. Padahal selain butuh uang untuk bayar pekerja, dia juga butuh modal membeli bahan dasar. "Modal usaha seperti kami tidak banyak. Kalau ada keterlambatan sedikit saja, semua jadi kacau," katanya.

Dia mengatakan, harusnya



DOK SPRUHT SEMIONO

Pekerja konfeksi pakaian anak-anak di Rt 14 Rw 3 Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Kamis (26/6), tidak beraktifitas karena listrik padam. Akibat pemadaman listrik bergilir ini membuat produksi pembuatan pakaian menjadi merugi jutaan rupiah. Pemadaman listrik mulai pukul 09.00-15.00 di beberapa wilayah Jakarta dan Tangerang.

PLN mencari jalan keluar terbaik agar ketersediaan listrik tetap terjamin. Menurut dia, seharusnya ada yang bertanggungjawab atas kerugian dia dan masyarakat lain. Seharusnya PLN memberikan kompensasi. Namun, Hamsyar mengaku tidak tahu bagaimana menyampaikan kerugian yang di-

akibatkan listrik padam tersebut. "Kami rugi PLN tidak mau tahu. Lagian kalau mau menuntut kemana?" katanya.

Hal senada diungkapkan Lisman, pengusaha sepatu rumah di Permata Balaraja, Tangerang. Menurut Lisman, usahanya tidak membutuhkan banyak listrik. [132/126]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 11		
TAHUN 2008		

Defisit listrik berpotensi hambat investasi sektor TPT Rp2 triliun

Oleh YUSUF WALUYO JATI
& SITI MUNAWAROH
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Rencana peremajaan permesinan dalam program peningkatan teknologi (restrukturisasi) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional senilai Rp2 triliun pada tahun ini terancam terganggu menyusul krisis listrik yang diperkirakan terus berlanjut hingga 2009.

Terlebih, kenaikan biaya energi yang ditandai lonjakan harga minyak mentah dunia—diprediksi akan menembus US\$170 per barel—dan batu bara pada tahun ini akan menyebabkan skala biaya produksi di sektor TPT berpotensi melonjak tiga kali lipat.

Karena itu, sejumlah pengusaha TPT mulai mempertimbangkan untuk menunda pembelian mesin-mesin baru. "Situasi ini sangat gawat sehingga pengusaha mulai berpikir ulang untuk membeli me-

sin-mesin baru dalam program restrukturisasi industri TPT nasional," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat kepada *Bisnis*, kemarin.

Investasi mesin-mesin baru itu, katanya, akan menambah kebutuhan daya listrik sebesar 100 megawatt (MW), sehingga total pasokan ke sektor TPT pada 2009 diperkirakan mencapai sekitar 400 MW-450 MW. "Kalau sudah ada mesin-mesin baru apakah mesin lama tidak beroperasi? Semuanya akan beroperasi sehingga akan meningkatkan kebutuhan daya listrik," ujarnya.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, PLN belum berkomitmen penuh menyiapkan kecukupan pasok listrik di sentra TPT Jawa-Bali pada tahun depan mengingat tidak adanya realisasi penambahan pembangkit baru.

"Kalau mesin-mesin itu dibeli sekarang, pabrik tidak bisa

berproduksi karena tidak ada listriknya, sementara bunga bank dan angsuran pembelian mesin jalan terus. Dari mana industri bisa membayar cicilan bank kalau mesin-mesin baru mereka mati semua karena tidak ada listrik?" katanya.

Sektor petrokimia

Sementara itu, lanjutnya, di industri petrokimia—sektor hulu dari industri serat sintetis—mulai kehilangan posisi tawar di pasar akibat lonjakan harga minyak mentah dunia yang pada 30 Juni menembus di atas US\$140 per barel.

Pada hal, katanya, sekitar 95% kebutuhan energi di industri petrokimia ditentukan oleh harga dasar minyak mentah. "Akibatnya, produk-produk turunan dari industri petrokimia khususnya poliester akan melonjak drastis, padahal bahan poliester merupakan komoditas sangat vital bagi sektor pengolahan serat," je-

lasnya.

Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian Ansari Bukhari membantah adanya sejumlah perusahaan tekstil yang menarik diri dari proyek restrukturisasi permesinan.

"Sekarang malah sudah ada 126 perusahaan yang menyampaikan proposal bantuan subsidi pembelian permesinan. Bahkan yang sudah mengikat kontrak dan lolos verifikasi ada 14 perusahaan dengan nilai investasi Rp10 miliar. Soal pasokan listrik, pada tahun depan beberapa pembangkit baru sudah selesai dibangun," katanya seusai raker antara Menteri Perindustrian dan Komisi VI DPR, kemarin.

Depperin, lanjutnya, tetap optimistis rencana investasi peremajaan mesin baru senilai Rp2 miliar akan terealisasi pada tahun ini kendati sejumlah pengusaha TPT mempertanyakan pasok listrik PLN.

14

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11

TAHUN 2008

Dewan Energi Nasional Akan Audit Produksi Listrik PLN

Audit terhadap produksi listrik PT PLN akan dilakukan oleh inspektur energi yang berada di bawah Dewan Energi Nasional (DEN).

"Audit produsen listrik itu oleh inspektur energi, kita belum tentukan siapa. Inspektur energi itu ada di bawah Dewan Energi Nasional," kata Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi, Evita Legowo, di Jakarta.

Menurut dia, audit energi tidak hanya dilakukan kepada konsumen listrik namun juga perlu dilakukan pada produsen.

"PLN sekarang berusaha memperbaiki pembangkitnya. Dia punya jadwal sendiri untuk itu karena kalau tidak diperbaiki dia tidak bisa meningkatkan efisiensinya. Indonesia ini termasuk yang boros energi, untuk memperbaikinya penggunaan energi selain produsennya konsumennya juga diaudit," jelas Evita.

Namun audit produksi listrik PLN belum dapat dilakukan dalam waktu dekat mengingat anggota DEN belum terpilih. DEN diketuai oleh Presiden yang didampingi oleh Wakil Presiden dengan ketua harian Menteri ESDM.

"Anggotanya ada yang dari pemerintah dan pemangku kepentingan. ESDM sudah melakukan seleksi terhadap calon anggota DEN. Proses administrasi sudah selesai, assessment juga sudah selesai, wawancaranya juga sudah selesai," jarnya.

Meneg ESDM akan memilih 16 nama calon anggota DEN yang akan diusulkan kepada DPR untuk diuji kelayakannya. ESDM akan menyerahkan daftarnya pada Presiden dan akan diserahkan ke DPR. Nanti dipilih delapan nama, setelah dipilih sudah bisa jalan," tambahnya.

Ia memperkirakan pada Juli atau Agustus ini daftar nama calon anggota DEN sudah dapat diusulkan ke DPR.

15

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2008

Krisis Listrik

Pemerintah Harus Tanggung Jawab

[JAKARTA] Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai, pernyataan perusahaan listrik pelat merah PT PLN (Persero) untuk memberikan ganti rugi kepada dunia usaha akibat pemadaman listrik beberapa waktu belakangan ini, hanyalah "angin surga." Kadin juga meminta pemerintah untuk bertanggung jawab.

Demikian dikatakan, Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia Bambang Soesatyo dalam rilis yang diterima SP, Senin (30/6) pagi. Dia menyebut, pernyataan PLN itu tidak perlu ditanggapi serius. "Hal itu hanyalah angin surga yang sulit direalisasikan mengingat kerugian yang diderita dunia usaha akibat pemadaman itu luar biasa," ujar Bambang.

Menurut dia, dengan pemadaman listrik ini, kerugian yang dialami dunia usaha tidak hanya mencapai triliunan rupiah, tapi juga *potential loss* karena gagal memenuhi pesanan tepat waktu.

Untuk itu, pelaku usaha, kata Bambang, meminta pemerintah dalam hal ini Departemen Energi, Sumber Daya dan Mi-

neral (ESDM) untuk segera mengatasi krisis daya listrik karena eksekusinya terhadap dunia usaha mulai bermunculan.

Kadin, sambung Bambang, berharap, pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM tidak menyederhanakan persoalan ini. Karena, kalau krisis daya listrik berkepanjangan, akan menjadi bom waktu yang menghancurkan dunia usaha nasional. Tanggung jawab mengatasi krisis listrik ini bukan hanya PLN, melainkan juga ESDM.

Di tempat terpisah, Pengurus Harian Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, aturan yang menyatakan bahwa kompensasi kepada masyarakat baru bisa diberikan jika terjadi gangguan selama 3x24 jam berturut-turut merupakan aturan lama.

"Itu aturan lama. Berdasarkan Keppres Nomor 89 tahun 2002 dan Dirjen Listrik No 114 Tahun 2002 kompensasi kepada masyarakat terhadap gangguan listrik diatur oleh masing-masing daerah berdasarkan jumlah gangguan, lama pemadaman dan kesalahan pencatatan meter," katanya.

Misalnya, jika terjadi pe-

madaman lebih dari 10 jam dalam tiga bulan, maka PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10 persen.

"Tapi pengurangan abodemen sebesar 10 persen sangat sedikit jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat terutama industri. Industri bisa melaporkan gugatan kepada PLN ke pengadilan dan meminta pertanggungjawaban PLN atas kerugian," katanya.

PLN bisa digugat menggunakan undang-undang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat 1 karena menjual di bawah standar. Dimana suplai listrik oleh PLN terus mengalami gangguan, PLN seharusnya memberikan suplai listrik berkelanjutan.

Namun, ditekankannya kondisi kelistrikan tidak hanya merupakan tanggung jawab PLN melainkan pemerintah. "Kondisi kelistrikan kita sudah sangat parah, pemerintah harus turun tangan langsung dan membuat kebijakan energi yang jelas. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjamin suplai energi nasional," katanya. [DLS/CNV/M-6]

16

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 22

TAHUN 2008

Krisis Listrik Masih Panjang

Pemadaman Bergilir Diatur Sesuai Kuota

PALEMBANG, KOMPAS — Pemadaman listrik secara bergilir di Sumatera bagian selatan dan tengah serta Jawa Tengah dipastikan masih berlanjut 2-3 bulan ke depan. Pasalnya, pasokan listrik dari pembangkit yang ada terus mengalami defisit karena penurunan kemampuan dan pemeliharaan.

Menurut Manajer Hukum dan Humas PT PLN Wilayah Sumatera Bagian Selatan Harris Effendi, Senin (30/6) di Palembang, hal itu terjadi karena defisit pasokan daya sebesar 150 megawatt (MW) akan berlangsung hingga September 2008. "Sampai kini PLN belum berhasil menyelesaikan perbaikan sistem pembangkit yang terjadi karena penurunan kemampuan dan pemeliharaan rutin.

"Persoalan utama yang dihadapi PLN adalah masih terkait penurunan kapasitas pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selama musim kemarau penurunan kapasitas memang sering terjadi akibat berkurangnya debit air sungai dan waduk.

Penurunan kapasitas tersebut terjadi di PLTA Singkarak, PLTA Besai, dan PLTA Kuto Panjang. Ketiga PLTA tersebut menghasilkan pasokan listrik di bawah pasokan normalnya, masing-masing hanya sebesar 36 MW, 110 MW, dan 90 MW. Padahal, PLTA ini memegang peranan penting dalam suplai pasokan listrik.

Sementara itu, Kepala Humas PT PLN APJ Purwokerto, Jawa Tengah, Samsino mengatakan, pemadaman bergilir di wilayah PT PLN Area Pelayanan Jaringan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, masih berlanjut hingga akhir Juli ini. Pasokan listrik untuk PLN APJ Purwokerto setiap harinya masih terus kekurangan 12-14 MW. Itu karena defisit produksi listrik

masih terjadi pada sejumlah pembangkit listrik di Jawa-Bali.

"Hingga akhir Juli mendatang pemadaman listrik bergilir ini masih akan terus berlangsung. Belum ada tanda-tanda pasokan listrik akan kembali normal," katanya.

“

**Hingga akhir Juli
mendatang, pemadaman
listrik bergilir ini masih
akan terus berlangsung.**

Samsino

Dengan berkurangnya pasokan listrik hingga 14 MW pada siang hari, lamanya pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo berlangsung selama 10 jam, yakni dari pukul 07.00 hingga 17.00.

"Sebaliknya, pada malam hari pemadaman bergilir akan berlangsung selama empat jam, dari pukul 17.00 sampai 21.00.

Kuota pemadaman

Berdasarkan data PLN Sumbagsel, defisit pasokan sebesar 150 MW tersebut akan dibagi

17

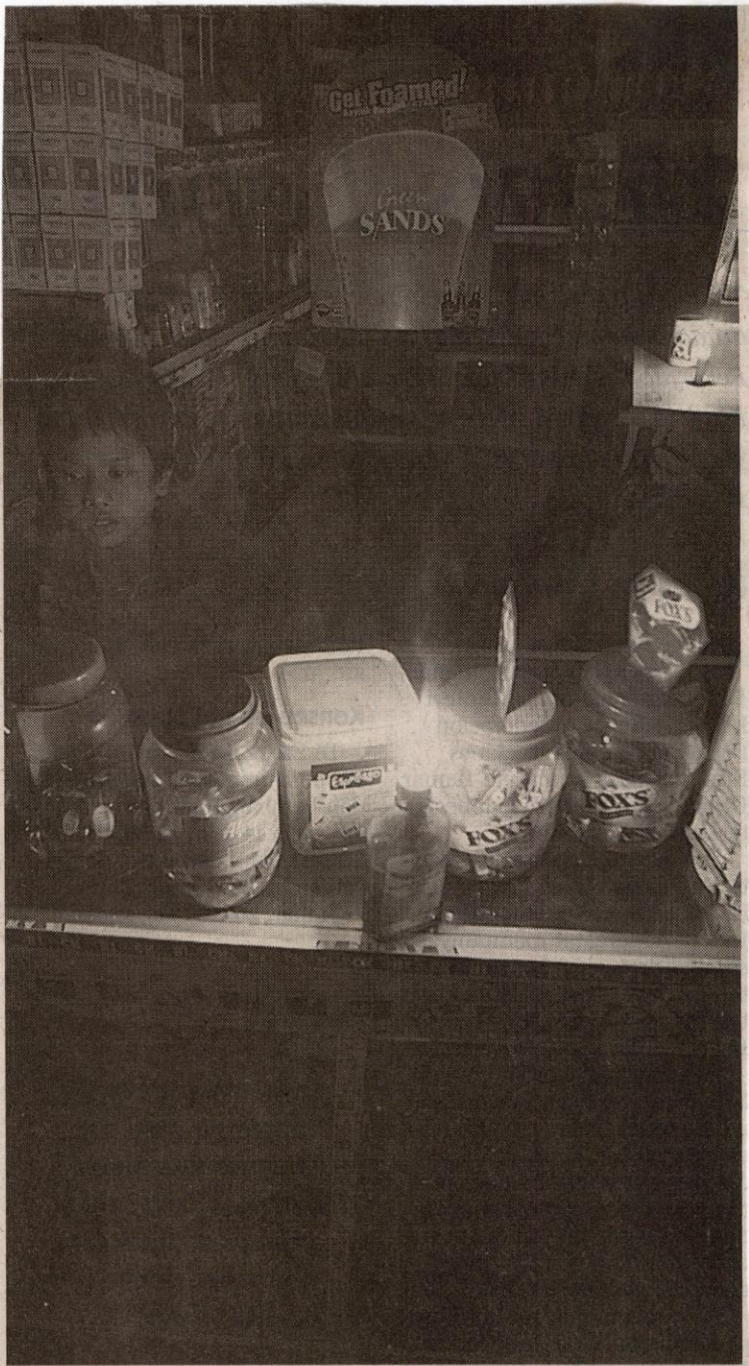
dengan sistem kuota per wilayah. Konsumen di Provinsi Jambi mendapat kuota pemadaman bergilir sebanyak 9 persen, Bengkulu 7 persen, Sumatera Selatan 20 persen, Sumatera Barat 25,5 persen, Riau 15,8 persen, dan Lampung 22 persen. Kota Palembang dan Kota Jambi akan dikurangi jatah pemakaian listriknya, masing-masing sebesar 18,5 MW dan 13 MW per harinya.

Manajer Operasi Sistem Penyaluran PT PLN Pusat Pengatur Beban Sumatera Sudibyo berharap, pemerintah pusat dan PLN segera merealisasikan rencana penambahan proyek 10.000 MW untuk seluruh Indonesia. Untuk wilayah luar Pulau Jawa, direncanakan mendapat jatah sekitar 3.000 MW.

Pencurian

Selain faktor kelemahan infrastruktur, pencurian listrik juga dinilai kian merunyamkan masalah. Deputi Manajer Komunikasi PT PLN Distribusi Jawa Barat-Banten Bambang Dwiyanto di Bandung mengatakan, pencurian listrik bertolak belakang dengan semangat hemat energi yang tengah gencar disosialisasikan. Kegiatan ilegal ini pun berisiko menimbulkan bahaya kebakaran akibat hubungan arus pendek. "Guna menekan pencurian listrik, sosialisasi masyarakat terus dilakukan," tuturnya.

(MDN/ONI/BAY)



KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Diterangi lampu minyak karena listrik padam, Suparyadi, membantu ibunya menjaga toko di kawasan Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (29/3). Pemadaman bergilir di Sumatera Utara masih akan berkelanjutan karena defisit pasokan listrik.

17

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 6 TAHUN 2008	

Listrik Panas Bumi Lebih Menguntungkan

BOGOR, (PR).-

Penggunaan panas bumi untuk sumber tenaga listrik memiliki banyak keuntungan jika dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya seperti batu bara, minyak bumi, dan air. Energi panas bumi menjamin keandalan operasional pembangkit karena fluida panas bumi sebagai sumber tenaga yang digunakan sebagai penggeraknya, akan selalu tersedia dan tidak akan mengalami penurunan jumlah.

Demikian dikemukakan pakar *geothermal* dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ali Ashat, dalam pelatihan jurnalistik yang digelar PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Perwakilan Bogor dan Chevron Geothermal Salak, Sabtu (28/6) lalu di Bogor.

Menurut dia, pembangkit panas bumi tidak akan memengaruhi persediaan air tanah karena sisa buangan airnya disuntikkan kembali ke bumi, sehingga tidak mengotori udara dan tidak merusak atmosfer. Kebersihan lingkungan sekitar pembangkit pun tetap terjaga karena pengoperasiannya tidak memerlukan bahan bakar, tidak seperti pembangkit listrik tenaga lain yang memiliki gas buangan berbahaya akibat pembakaran.

"Sebenarnya penggunaan panas bumi untuk sumber tenaga listrik memiliki banyak

keuntungan bila dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya seperti batu bara, minyak bumi, air dan sebagainya," ujar Ali.

Sementara di sektor ekonomi, pengembangan energi panas bumi dapat meningkatkan devisa negara. Penggunaannya dapat meminimalkan pemakaian bahan bakar di dalam negeri. Sebagai contoh, kata Ali yang jebolan Post Graduate Diploma di Geothermal Institute of Auckland University itu, dengan mengembangkan panas bumi sebesar 330 mw sebagai pembangkit listrik yang dihasilkan pihak Chevron Geothermal dari lapangan Gunung Salak, di Kab. Bogor dan Sukabumi, negara dapat menghemat pemakaian minyak bumi sebesar 105 MM BBL.

Sementara itu, Community Affairs Manager Chevron Geothermal Salak yang didampingi Community Engagement Officer, Asrul Maulana, mengatakan, pengelolaan usaha panas bumi oleh PT Chevron Geothermal Salak, sudah dimulai sejak tahun 1982 dan baru berproduksi pada 1994.

Aktivitas pengelolaan panas bumi Chevron Geothermal Salak 2002 hingga 2006, sudah menghasilkan 114,2 juta ton uap dan 13,8 mwh listrik. Sedangkan hingga 2008 telah menghasilkan listrik sebesar 375 mwh. (A-134)***

18

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

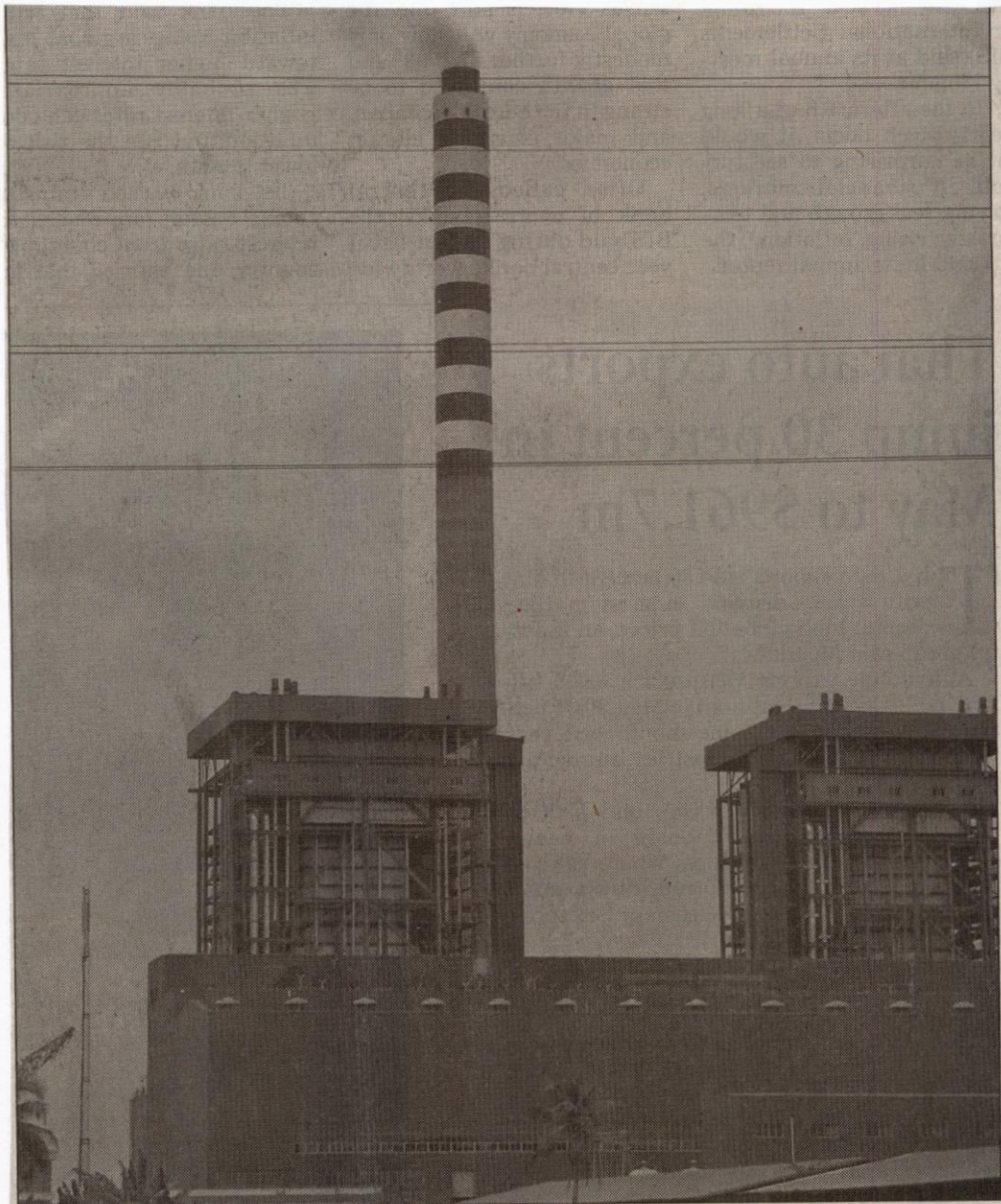
MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008



JPI/Agus Maryono

SMOKE SIGNAL: Smoke rises again from a coal-fired power plant in Cilacap that has been off-line for a week due to a coal shortage. The plant supplies 600 megawatts of electricity to nearby areas.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2008

■ PASOKAN SETRUM JAWA-BALI

PLTU Cilacap Mulai Beroperasi Lagi

CILACAP. Setelah berpuasa menyuplai setrum untuk distribusi Jawa Bali hampir sepekan, akhirnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap mulai beroperasi lagi. Pembangkit yang dioperasikan PT Segara Sumberdaya Prima telah memutar turbin penghasil listrik mulai Senin (30/6) dini hari.

PLTU Cilacap sempat berhenti total memproduksi listrik sejak 24 Juni 2008 lalu karena persediaan batubara habis. "Kami kembali memproduksi sejak dini hari tadi, karena pasokan batubara telah datang," kata Sutikno, *Field Manager* PLTU Cilacap, Senin (30/6).

Meski demikian, produksi listrik dari PLTU Cilacap belum bisa maksimal. Karena yang beroperasi baru satu turbin yang memiliki kapasitas 300 megawatt (MW). Padahal sesuai kapasitas turbin yang terpasang di PLTU Cilacap adalah 2x300 MW atau menghasilkan total setrum sebesar 600 MW. "Jika pasokan batubara sudah mencukupi, kami akan mengoperasikan kedua turbin sehingga produksi listrik bisa maksimal yakni 600 MW," katanya.

Menurut pengakuan Sutikno, PLTU Cilacap bisa kembali beroperasi setelah mendapat pasokan batubara sebanyak 7.545 ton. Batubara tersebut telah datang di Pelabuhan Cilacap sejak Sabtu (28/6) yang lalu. Tidak hanya itu, pasokan batubara akan terus berlanjut. Pada pekan ini, sebuah kapal tongkang yang mengangkut batubara se-

banyak 12.500 ton, akan segera merapat di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap.

Sutikno menjelaskan, meski batubara sudah datang sejak Sabtu, namun turbin pembangkit tidak bisa langsung beroperasi untuk menyuplai setrum. Peralannya untuk mengoperasikan turbin setelah berhenti produksi harus membutuhkan waktu lama untuk pemanasan yakni membakar batubara dengan bahan bakar minyak (BBM).

Baru satu turbin PLTU yang beroperasi karena masih menunggu kepastian pasokan batubara.

Pemanasan tersebut membutuhkan waktu sekitar delapan jam dan menelan biaya sedikitnya Rp 1,5 miliar. "Dana tersebut untuk membeli BBM, bahan kimia, dan sebagainya, yang kami gunakan untuk proses pemanasan turbin setelah berhenti operasi," katanya.

Sekadar mengingatkan, pasokan batubara PLTU Cilacap berasal dari PT Adaro Energy. Beberapa waktu lalu, Adaro menghentikan suplai batubara karena Segara Sumberdaya masih menunggu pembayaran batubara Rp 68 miliar.

Syamsul Ashar, Antara

20

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2008

PLN Membangun PLTU di Pangkalan Susu

JUMLAH pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terus bertambah. Rencananya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan membangun satu unit pembangkit listrik lagi, yang berada di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

General Manager Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau PT PLN Indra Pribadi menyatakan, pembangunan PLTU berkapasitas 2X200 Megawatt (MW) ini untuk mengatasi krisis pasokan listrik yang selama ini sering melanda kawasan Sumatera Utara.

Pembangunan pembangkit ini akan dilakukan oleh tiga perusahaan konsorsium yakni kontraktor Chuan Dong dari China, PT Bagus Karya Jakarta dan PT Nincek Bandung dengan nilai kontrak sebesar US\$ 270 juta. Kontraktor proyek pembangkit listrik, bisa segera membangun proyek ini, lantaran proses pembebasan lahan seluas 105 hektare sudah selesai. "Dan saat ini sedang dilakukan pembersihan lahan termasuk untuk persiapan pembangunan akses jalan ke lokasi," kata Indra Pribadi, kemarin (30/6).

Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin berharap pembangunan pabrik setrum ini selesai tepat waktu sehingga krisis listrik di Sumatera Utara bisa segera musnah. PLN memperkirakan, satu unit pembangkit sudah bisa mulai beroperasi dan memproduksi listrik pada Agustus 2010 sedangkan satu unit lainnya akan beroperasi November 2010.

Edy Can, Antara

21

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 0.2

TAHUN 2008

Krisis Listrik Hambat Industri

JAKARTA — Kegiatan investasi terhambat akibat langkanya pasokan listrik untuk industri. Pertumbuhan industri pada tahun depan diperkirakan hanya 5,6 persen dari target sebesar 6 persen.

"Kelangkaan listrik menghambat realisasi dan ekspansi investasi industri," ujar Menteri Perindustrian Fahmi Idris setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Sedangkan beberapa industri dengan modal kuat, kata dia, membangun pembangkit sendiri.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan target pertumbuhan industri rata-rata 8,56 persen pada tahun depan. Asumsinya, pertumbuhan industri manufaktur sektor makanan minuman dan tembakau sebesar 3,35 persen, industri tekstil barang kulit dan alas kaki (minus 2,09 persen), barang kayu dan hasil hutan lainnya (minus 0,07 persen), serta industri kertas dan bahan cetakan (4,6 persen). Selain itu, industri pupuk kimia dan barang dari ka-

ret (1,35 persen), industri semen dan bahan galian nonlogam (1,48 persen), industri logam dasar besi dan baja (3,52 persen), industri alat angkut mesin dan peralatan (12,75 persen) serta industri barang lainnya (minus 2,8 persen).

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Ansari Bukhari mengatakan ada 12 industri tekstil yang tak mendapat kebutuhan listrik dan menunda investasi. "Selain itu, tersebar industri tekstil di Sukabumi yang belum mendapat pasokan listrik," katanya.

Menurut Ansari, target pertumbuhan industri tekstil awalnya direncanakan tumbuh 4-5 persen dibanding 2008 yang minus 2,3 persen. "Karena masalah listrik, industri tekstil diperkirakan masih negatif," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyatakan krisis listrik mempengaruhi kegiatan investasi. "Bagaimana meminta investor datang ke Indonesia kalau listriknnya tidak ada?" ujarnya. ● YULIANATI

22

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

KETENAGALISTRIKAN

Pemerintah akan Audit PLN secara Menyeluruh

JAKARTA (MI): Pemerintah akan segera mengaudit PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara menyeluruh. Audit itu dilakukan baik audit teknis maupun audit untuk tujuan yang lebih besar terkait dengan banyaknya pembangkit listrik yang rusak seperti di Cilacap, Jawa Tengah.

"PLN, termasuk pembangkit di Cilacap, memang harus diaudit baik audit teknis maupun audit untuk tujuan yang lebih besar," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di Jakarta, kemarin.

Audit untuk tujuan yang lebih besar, jelas Sofyan, perlu dilakukan. Selama ini pun audit teknis standar sudah dilakukan. Audit teknis memang telah dilakukan dan telah menjadi wewenang PLN. "Khusus untuk Cilacap, memang sudah banyak masalah dari awal," kata Sofyan.

Terkait dengan sering adanya pemadaman listrik bergilir, hal itu disebabkan penggunaan *power* terlalu besar dan pihaknya saat ini sedang membangun *power plant* yang rampung 2009.

Karena itu, menurutnya, jalan satu-satunya untuk itu adalah

menghemat listrik sebab bila listrik bisa dihemat hingga 500 megawatt (Mw), pemadaman bergilir tidak akan ada lagi. "Maka itu, saya minta ada iklan-iklan yang terus memasyarakatkan matikan listrik pada malam hari ketika sudah tidak digunakan."

Namun, ia menekankan pemadaman listrik tidak akan terjadi lagi pada 2009 dengan rampungnya program percepatan pembangunan listrik 10.000 Mw.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah cq Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengatasi krisis daya listrik dengan membangun sinergi tiga BUMN yaitu PLN, Pertamina, dan BUMN penghasil batu bara.

"Pelaku usaha meminta Departemen ESDM sebagai departemen yang paling bertanggung jawab secara teknis untuk segera mengatasi krisis daya listrik karena eksekusinya terhadap dunia usaha mulai bermunculan di mana-mana," kata Ketua Komite Tetap Bidang Moneter dan Fiskal Bambang Soesatyo, kemarin. (Ant/E-2)

23

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : A.2 TAHUN 2008	

EDITORIAL

Audit Pelanggan PLN

Kalau sebuah perusahaan tak mampu memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan itulah yang harus memperbaiki ketertinggalannya. Bukan sebaliknya, pelanggan disuruh menahan permintaan, bahkan diperiksa apakah barang yang dibeli sudah dimanfaatkan dengan baik.

Prinsip itulah yang mestinya digunakan oleh PLN. Sayangnya, alih-alih memberikan pelayanan lebih baik untuk konsumen, kini PLN berencana melakukan audit terhadap konsumen listrik di Jakarta, khususnya gedung-gedung perkantoran. Audit, kata PLN, dilakukan untuk mengetahui apakah listrik sudah digunakan dengan benar. PLN ber-alasan, dalam situasi krisis listrik seperti sekarang, bila pelanggan bisa berhemat, krisis listrik bisa berkurang.

Logika ini sulit diterima karena beberapa alasan. Pertama, hubungan antara PLN dan pelanggan adalah hubungan jual-beli. PLN menyediakan listrik, pelanggan membayar. Bila terjadi krisis listrik, ini masalah PLN, bukan masalah pelanggan. Lain soal bila krisis listrik terjadi karena pelanggan curang, misalnya mencuri listrik sehingga pembayaran yang mereka lakukan lebih kecil daripada penggunaan.

Kedua, pelanggan listrik, khususnya kelas bisnis, terkena ketentuan tarif daya maksimal saat beban puncak. Tarif ini jauh lebih mahal dibanding tarif normal. Ini berarti mereka sudah membayar lebih

pemakaian listriknya. Bahkan, walaupun audit dilakukan terhadap kelompok rumah tangga, ini pun tidak tepat. Soalnya, melalui sistem pentarifan insentif dan disinsentif, mereka juga harus membayar lebih mahal bila konsumsi listriknya lebih boros daripada rata-rata konsumsi nasional. Artinya, baik pelanggan kelas bisnis maupun kelas rumah tangga sebetulnya sudah "dihukum" bila mereka terlalu boros menggunakan listrik.

Alasan ketiga, taruhlah audit dilakukan, pertanyaan berikutnya: untuk apa hasil audit yang pasti pelaksanaannya memakan biaya mahal itu? Yang bisa dilakukan PLN akhirnya hanya mengimbau agar pelanggan mengurangi pemakaian listrik. Imbauan ini pun tak bisa mengikat. Sebab, selama pelanggan membayar sesuai dengan pemakaian, mereka tetap harus dilayani kebutuhannya.

Sebetulnya, ketimbang melakukan audit terhadap pelanggan, akan lebih tepat bila PLN mengaudit kinerjanya. Audit tak hanya dari sisi perhitungan biaya produksi dan harga jual listrik, tapi juga pada kemampuan pembangkit listrik yang ada.

Krisis listrik terjadi karena sejumlah pembangkit listrik tidak beroperasi, baik akibat rusak maupun kekurangan bahan bakar. Padahal, bila berfungsi normal, pembangkit di Jawa-Bali saja mampu memasok 20 ribu megawatt listrik. Ini jauh lebih besar ketimbang pemakaian listrik pada beban puncak, yang berkisar 16 ribu megawatt.

Aspek inilah yang justru harus diaudit oleh PLN. Dengan audit yang tepat, PLN mestinya mampu mencari solusi agar tingkat rusaknya pembangkit dan keterlambatan pasokan bahan bakar bisa ditekan. Jangan karena krisis pembangkit, pelanggan yang harus menanggung akibatnya. ●

24

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A.2

TAHUN 2008

Pembangkit Listrik PLN Segera Diaudit

JAKARTA — Pemerintah akan mengaudit pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN untuk mengetahui sistem pengelolaannya dan efisiensi penggunaannya energi.

Staf ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Legowo, mengatakan audit listrik tak hanya ditujukan kepada konsumen. "Produsennya juga harus diaudit," katanya di Jakarta kemarin.

Audit akan dilakukan oleh Dewan Energi Nasional. Langkah ini dipandang perlu mengingat tingkat elastisitas energi di Indonesia masih cukup tinggi. Parameter ini mengukur perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi dan ekonomi suatu negara. Jika angka elastisitas tinggi, negara itu terbilang inefisien alias boros dalam penggunaan energi.

Pada 2004, elastisitas energi di Indonesia mencapai 1,84. Angka ini lebih tinggi dibanding di negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia (1,69), Thailand (1,16), dan Singapura (0,73). Di sejumlah negara maju, angkanya bahkan lebih kecil lagi: Amerika Serikat 0,26, Kanada 0,17, dan Jepang 0,10.

Desakan untuk mengaudit pembangkit PLN muncul setelah ada rencana peme-

rintah mengaudit penggunaan listrik pada gedung perkantoran dan tempat usaha. Rencana audit terhadap konsumen listrik ini diprotes sejumlah kalangan karena dinilai salah sasaran.

Menurut mereka, seharusnya audit dilakukan terhadap manajemen PLN. Tentangan antara lain datang dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, ahli kelistrikan Soetjipto Soewono, Sekretaris Jenderal Advokasi Konsumen Listrik Indonesia Yunan Lubis, dan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Tutum Rahanta.

Menurut Soetjipto, krisis listrik yang berakibat pada pemadaman di Jawa-Bali seharusnya tidak perlu terjadi, karena masih ada cadangan listrik sekitar 4.000 megawatt atau 26 persen dari daya mampu listrik. "Tapi, karena banyak pembangkit yang rusak dan tidak optimal pemeliharaannya," kata dia, krisis listrik tak terelakkan.

Pembangkit bermasalah itu di antaranya pembangkit Cilacap dan pembangkit listrik tenaga gas Cilegon. "Pembangkit Cilacap rusak, sedangkan pembangkit Cilegon tidak beroperasi karena tidak ada pasokan gas," ujarnya. ● ALI NY | NIEKE INDIRIETTA

25

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES ① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 21 TAHUN 2008	

**Terima Kasih
untuk PLN
Baleendah**

PADA Jumat 20 Juni 2008, perumahan kami Baranang Siang Indah Baleendah kedatangan pegawai-pegawai PLN yang katanya mau silaturahmi dan sosialisasi ke semua pelanggan di kompleks kami. Sebagai pelanggan PLN tentu saja kami senang, apalagi saat itu di depan Mesjid Husnul Khotimah telah dibuka klinik konsultasi hemat listrik, jadi saya bisa bertanya tentang kiat-kiat berhemat supaya rekening listrik di rumah saya murah.

Saya angkat jempol buat PLN Baleendah, apalagi pegawai ibu-ibunya pun turun tangan. Akan tetapi, saya harap jangan sekali ini saja kegiatan seperti ini dilakukan, teruskan *dong*, supaya para pelanggan yang haus informasi dan pelayanan dapat lebih berwawasan. Selain itu, PLN bisa lebih kenal dengan pelanggannya. Untuk Redaksi *Pikiran Rakyat*, terima kasih atas dimuatnya surat ini. Bravo PLN. Teruskan Perjuangan!

**Dian Lindawati
Komp. Baranang Siang Indah
L2 No. 17 Ciparay
Kab. Bandung**

26

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2008

PLN

Defisit Listrik belum Teratasi

PURWOKERTO (MI): Aliran listrik sebagian wilayah Jawa Tengah di Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, dan Banyumas masih akan padam secara bergilir sampai akhir Juli ini.

Pasalnya, PT PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Purwokerto, Jawa Tengah, yang meliputi daerah-daerah tersebut selama Juli ini masih defisit antara 12 megawatt (Mw) dan 14 Mw.

Humas PLN APJ Purwokerto Samsino mengharapkan pengertian pelanggan baik tingkat rumah tangga maupun perusahaan lantaran defisit listrik masih belum juga bisa diatasi PLN. Defisit selama Juli berkisar antara 12 Mw dan 14 Mw.

Secara terpisah, Manajer Teknik PLTU Cilacap Sutikno mengatakan operasional PLTU dimulai pada Minggu (29/6) malam.

Namun, produksi yang dihasilkan belum normal sesuai dengan kapasitas 600 Mw. Operasional PLTU Cilacap baru satu unit dengan produksi yang dihasilkan 300 Mw.

Sementara itu, Kepala Seksi Penjagaan dan Penyelamatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Aher Priyatno, mengatakan hingga kemarin sudah ada kapal yang masuk, yakni King Fisher dengan mengangkut 7.545 ton batu bara dan kapal tongkang TB KSA dengan angkutan 12.500 ton.

Dari Surabaya, Jawa Timur, dilaporkan, permintaan PT PLN, agar industri menggilir hari libur karyawannya ditanggapi dingin oleh kalangan industri yang memiliki kapasitas produksi cukup besar. Pertimbangannya, industri tersebut dituntut produksi dan pendistribusian produk sesuai dengan jadwal. "Untuk menggilir hari libur, rasanya sangat sulit kami lakukan sebab sekarang pasar lagi ramai," kata Manajer Komunikasi PT Maspion Grup Soeharto, kemarin. (LD/FL/N-3)

27

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

DEN Audit PLN

JAKARTA- Audit terhadap produksi listrik PT PLN akan dilakukan oleh inspektur energi yang berada di bawah Dewan Energi Nasional (DEN). Audit tidak hanya dilakukan kepada konsumen listrik, tapi juga produsen.

Namun, audit produksi listrik tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena anggota DEN belum terpilih. DEN diketuai oleh presiden yang didampingi wakil presiden dengan ketua harian menteri ESDM.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Evita H Legowo mengatakan, PLN saat ini berusaha memperbaiki pembangkitnya. Perusahaan listrik pelat merah itu memiliki jadwal sendiri. Kalau tidak diperbaiki, PLN tidak bisa meningkatkan efisiensinya.

"Indonesia ini termasuk yang boros energi, untuk memperbaikinya penggunaan energi selain produsennya, konsumennya juga diaudit," jelas Evita di Jakarta, Senin (30/6).

Sementara itu, Menneg BUMN Sofyan Djalil mendukung rencana audit PLTU Cilacap karena pembangkit tersebut sejak awal pendiriannya bermasalah. "Ini wewenang PLN mengauditnya, audit teknis maupun audit dalam skala besar," ujar Menneg BUMN Sofyan Djalil di

Jakarta, kemarin.

Dari Cilacap dilaporkan, kantor berita *Antara* menyatakan, PLTU berkapasitas 2X300 megawatt (MW) tersebut, kemarin, mulai memproduksi listrik setelah berhenti produksi akibat habisnya persediaan batubara sejak 24 Juni lalu. Kendati begitu, produksi listrik PLTU tersebut belum bisa maksimal sesuai kapasitas turbin yang terpasang.

Field Manager PLTU Cilacap Sutikno, mengatakan, pihaknya saat ini hanya mengoperasikan satu turbin pembangkit sehingga untuk sementara listrik yang dihasilkan baru 300 MW. Jika pasokan batubara mencukupi, kedua turbin akan dioperasikan sehingga produksi listrik bisa maksimal. PLTU Cilacap bisa kembali beroperasi setelah pasokan batubara sebanyak 7.545 ton datang pada Sabtu (28/6) dan akan disusul dengan tongkang yang mengangkut sebanyak 12.500 ton batubara beberapa hari berikutnya.

Namun, untuk mengoperasikan turbin setelah berhenti produksi harus membutuhkan waktu lama untuk pemanasan yakni membakar batubara dengan BBM. Pemanasan tersebut membutuhkan waktu sekitar delapan jam dan menelan dana sedikitnya Rp 1,5 miliar. (pya/c117)

28

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A.9

TAHUN 2008

Jawa Barat Siap Kelola Pembangkit Panas Bumi

Kendala program konversi energi adalah soal sosialisasi ke masyarakat.

JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan kesiapan provinsinya memasok listrik dari pembangkit listrik tenaga *geothermal* atau panas bumi. Penegasan itu disampaikan setelah dia bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya kemarin. "Kami siap bekerja keras. Karena itu, kami minta *support* Wakil Presiden," kata Heryawan.

Seperti diketahui, pemerintah berencana membangun sejumlah pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik 10 ribu megawatt di Indonesia. Pembangunan itu ditargetkan selesai pada 2010 dengan diversifikasi energi. Dari tenaga batu bara ditargetkan menyumbang 30 persen, gas 30 persen, dan *geothermal* 30 persen.

Menurut Heryawan, potensi *geothermal* di Jawa Barat cukup memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Ia berharap pembangunan

pembangkit listrik *geothermal* ini dapat memasok kebutuhan listrik warga.

Yang jelas, menurut Heryawan, Jawa Barat menargetkan akan mengembangkan pemakaian energi terbarukan. Selain panas bumi, tengah dikembangkan pemanfaatan biogas dan sel surya untuk menjadi pemasok energi alternatif. "Meskipun kendala program konversi energi adalah sosialisasi ke masyarakat," ujarnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat Tb. Hisni mengatakan setidaknya ada 24 titik sumber panas bumi yang berpotensi digarap sebagai pembangkit. Empat di antaranya sudah dibangun di Kamojang, Kawah Drajat, Wayang Windu, dan Gunung Salak. "Tiga pembangkit lagi menyusul," kata Hisni beberapa waktu lalu.

Saat ini proses tender untuk tiga

pembangkit itu sudah digelar. Ketiga lokasi itu adalah Gunung Tangkuban Parahu dengan kapasitas 150 megawatt, lokasi Cisolok-Cisurame berkapasitas 50 megawatt, dan Gunung Tampomas dengan kapasitas 48 megawatt.

Setidaknya sudah ada 17 perusahaan yang ikut tender. Sembilan di antaranya untuk WKP Tangkuban Parahu, empat perusahaan untuk WKP Cisolok-Cisarame, dan empat perusahaan untuk WKP Gunung Tampomas. "Salah satu perusahaan memasukkan penawaran untuk dua lokasi pembangkit panas bumi," ujarnya.

Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007, menurut Hisni, satu perusahaan hanya boleh mengelola atau memenangkan satu wilayah kerja pertambangan.

Hisni memperkirakan setidaknya butuh investasi sebesar Rp 3,5

29

triliun untuk tiga pembangkit itu. Paling mahal adalah Tangkuban Parahu dengan biaya Rp 1,5 triliun. Sisanya, masing-masing Cisolok-Cisukarame dan Gunung Tampo- mas Rp 1 triliun.

Menurut Hisni, pembangunan diperkirakan memakan waktu sampai tiga tahun. Tiga tahun pertama proses eksplorasi dan setahun kemudian sudah bisa memanen hasilnya. Pembangkit itu diharapkan akan rampung pada 2012.

Hisni mengaku sudah mengantongi kesepakatan dengan PLN untuk pembelian listrik yang dihasilkan tiga pembangkit itu. Kesepakatan itu difasilitasi oleh Dirjen Listrik dan Pemanfaatan energi. "Sudah ada kesepakatan PLN akan membeli dan harganya sudah diatur dari Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)," katanya.

● KURNIASIH BUDI | AHMAD FIKRI

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Ancaman Serious Defisit Listrik



Bambang Soesatyo
Ketua Komite
Tetap Moneter dan
Fiskal Kadin Indonesia

Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Begitulah kira-kira yang dirasakan para pelaku usaha kita akhir-akhir ini. Belum lepas dari masalah kenaikan harga BBM yang menyebabkan ongkos produksi naik dan menggerus daya beli konsumen, kini timbul persoalan keterbatasan pasokan listrik.

Pemadaman bergilir listrik di sejumlah besar wilayah di Tanah Air dipastikan berlangsung hingga 2010. Sebab, kebutuhan nasional saat ini mencapai 40.000 megawatt (MW), sedangkan total daya yang dihasilkan PLN hanya sekitar 29.000 MW sehingga terdapat defisit daya 11.000 MW.

Ini tentu merupakan kabar buruk bagi dunia usaha nasional. Pemutusan arus listrik secara bergilir di wilayah Jawa dan Bali yang terjadi sejak 17 Juni 2008, diperkirakan semakin meluas. Kita tidak bisa membayangkan berapa besar kerugian yang terpaksa dipikul pengusaha dan masyarakat.

Kita bisa kutip pemberitaan tentang kekecewaan komunitas pengusaha di Cilacap dan Solo. Akibat pemadaman listrik terus-menerus, sejumlah pengusaha

di Cilacap dan Solo tidak hanyamelancarkan protes, tetapi juga mengancam akan menyomasi PLN.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) wilayah Cilacap memastikan ancaman somasi itu benar-benar akan dilakukan jika pemadaman masih terus berlangsung. Proses produksi di lebih dari 45 perusahaan anggota Apindo Cilacap terdendat-sendat akibat listrik mati.

Sebelumnya, 26 industri di Keresidenan Surakarta sepakat mengurangi konsumsi listrik dan setuju dilakukan pemadaman. Dengan catatan, ada pemberitahuan lebih dulu dari PLN guna menghindari kerugian besar. Permasalahannya, dengan asumsi pemadaman dilakukan satu kali dalam seminggu, pengusaha rugi sekitar 15% dari total omzet.

Kendati baru terjadi di Cilacap dan Solo, esensi persoalannya jangan disederhanakan, sebaliknya harus dilihat sebagai persoalan yang amat serius. Untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di daerah lain, mesti ada kemauan sebab sangat berbahaya.

Dalam Inpres No 5/2008 tentang Perbaikan Iklim



Investasi, ada klausul mewujudkan ketahanan energi. Kadin mendesak pemerintah tidak setengah-setengah menangani masalah ini. Pemerintah harus fokus dan konsisten menjaga ketersediaan energi, utamanya daya listrik. Kalau peristiwa di Cilacap dan Solo terjadi juga di daerah lain, inpres yang memuat program aksi perbaikan iklim investasi itu akan sia-sia, bahkan gagal total.

Pengakuan PLN dan fakta bahwa pemadaman listrik secara bergilir tidak terhindari, menjadi bukti, sekaligus menambah bobot pembenaran kalau iklim berusaha di Indonesia benar-benar ti-

dak kondusif. Bagaimanapun, faktor stabilitas ketersediaan daya listrik menjadi variabel tidak terpisah dalam terminologi iklim berusaha yang kondusif.

Maka itu, kegagalan PLN mengatasi defisit daya listrik harus menjadi tanggung jawab bersama. PLN telah memastikan sistem kelistrikan khusus Jawa-Bali terus mengalami krisis hingga proyek 10.000 MW selesai. Proyek 10.000 MW saat ini baru memasuki 32% tahap konstruksi di 35 lokasi. Dana yang sudah tersedia sekitar Rp92,8 triliun dalam bentuk pinjaman dan PLN masih membutuhkan Rp45,3 triliun.

Jadi, sambil menunggu proyek 10.000 MW itu selesai, tidak bisa tidak semua harus turun tangan. Tidak bijaksana jika seluruh beban diletakkan di pundak PLN. Target ketahanan energi daya listrik harus ditempatkan sebagai kewajiban bersama antara PLN, Pertamina, dan BUMN batu bara.

Guna menghindari meluasnya gugatan masyarakat terhadap PLN karena melanggar Pasal 18 UU 8/99 tentang Perlindungan Konsumen^{jo} Pasal 1365 KUH Perdata tentang Penuntutan Ganti Rugi, pemerintah harus mewajibkan tiga BUMN itu bertanggung jawab atas stabilitas ketersediaan daya listrik. BUMN-BUMN itu tidak boleh lagi berpikir sektoral seperti sekarang. PLN, Pertamina, dan BUMN batu bara harus berbagi tanggung jawab sama besar bagi stabilitas ketersediaan daya listrik. Di bawah perintah Pembantu Pelaksana Menko Per-ekonomian, Meneg BUMN harus bisa memadu prioritas program kerja BUMN-BUMN itu. Tidak ada gunanya perusahaan-perusahaan itu untung besar kalau mereka tidak bisa mengakomodasi kepentingan nasional yang jauh lebih besar.*

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 38		TAHUN 2008

Setrum Surya ala Dena

Di Serpong, Jerman memamerkan teknologi sel surya yang menggabungkan dua sistem sekaligus. Pemerintah belum tertarik. Padahal, potensi Indonesia sangat besar.

Bona Ventura

KRISIS setrum yang menghantui Indonesia agaknya tak terlalu membuat pusing pengelola Deutsche Internationale Schule. Sejak minggu dua pekan lalu, Sekolah Internasional Jerman yang berada di kawasan elite Bumi Serpong Damai itu telah memboyong sistem tenaga surya mandiri dari Negeri Franz Beckenbauer. Bukan ha-

nya mencukupi kebutuhan listriknya, teknologi "hijau" itu juga berfungsi memenuhi kebutuhan air panas, baik di dalam maupun luar ruangan.

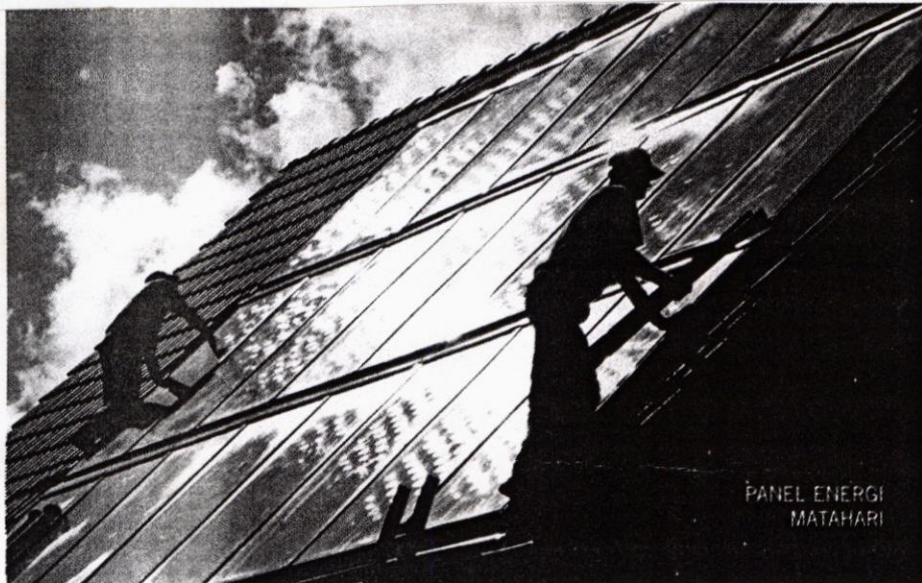
Atap Surya Jakarta, demikian proyek itu disebut, didanai oleh Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman serta Sunset Energietechnik GmbH., salah satu per-

usahaan yang menggeluti bisnis pengembangan sel surya. "Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan teknologi sel surya," ujar Matthias Raab, juru bicara Deutsche Energie-Agentur (Dena), Badan Energi Jerman.

Sistem tenaga surya mandiri ini, terang Matthias Raab, bisa diaplikasikan di berbagai tempat, seperti sekolah, perumahan, tempat usaha ataupun daerah pertanian dan peternakan. Yang diperlukan di sini, katanya, hanya sinar matahari.

Aswin Linsenmeyer, Chief Technology Officer Sunset Energietechnik GmbH., menerangkan bahwa teknologi atap surya yang diterapkan di Sekolah Internasional Jerman menggunakan dua sistem, yaitu sel *photovoltaic* dan sistem air panas.

Sel *photovoltaic* mengubah radiasi sinar matahari menjadi listrik secara langsung. Sedangkan sistem yang kedua bekerja dengan cara menyerap sinar matahari—dilakukan oleh panel atap surya—dan mengubahnya menjadi energi panas. Radiasi energi surya tersebut kemudian digunakan untuk memanaskan air yang berada di



dua tangki penampungan. Dari pemanasan air itulah listrik kemudian dihasilkan.

Menurut Aswin, efisiensi sistem yang digunakannya itu sekitar 15%. Namun, hal itu tergantung dari sel surya yang digunakan. Secara umum dari 1,9 meter persegi panel yang terpasang akan menghasilkan setrum sebesar 140 watt. Di sisi lain, dengan menggunakan panel seluas 16,5 meter persegi (seperti yang terpasang di Sekolah Internasional Jerman) emisi CO₂ yang dapat dipangkas sampai dengan 1.089 kg.

Seperti diketahui, harga energi fosil yang terus meroket belakangan ini memantik niat sejumlah negara mencari energi alternatif yang rasional. Apalagi, cadangan sumber energi yang berasal dari fosil—khususnya batu bara—di seluruh dunia diperkirakan hanya akan bertahan paling lama 200 tahun. Bahkan, untuk minyak bumi diyakini tinggal memiliki ketersediaan untuk 40 tahun. Padahal, kebutuhan energi dunia pada tahun 2000-2030 diperkirakan melambung hingga 70%.

Tak heran jika perusahaan pembiayaan internasional seperti GE Energy Financial Services rela menggelontorkan dana hingga US\$ 3 miliar untuk mendanai proyek energi terbarukan hingga tahun 2008. "Kami sangat yakin bahwa teknologi sel surya akan memiliki peluang bisnis yang luar biasa," kata Kevin Walsh, Managing Director GE Energy Financial Services.

Sementara itu, Amerika Serikat sebagai salah satu importir minyak terbesar di dunia, sejak tahun 1980-an telah membangun stasiun pembangkit listrik tenaga

surya dalam skala yang cukup besar. Negeri Paman Sam itu memiliki cermin-cermin raksasa berbentuk parabola yang digunakan untuk memfokuskan sinar matahari. Panas yang terhimpun lantas digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang setrumnya mampu menerangi tak kurang dari 150 ribu rumah.

Pembangkit listrik tenaga surya yang berada di Gurun Mojave itu terus dikembangkan hingga memiliki 70 ribu panel pemanen energi matahari. Hasilnya, jutaan rumah kini teraliri listrik tenaga matahari. Bahkan, kapasitas itu akan semakin melonjak hingga enam kali dari yang diproduksi Amerika Serikat saat ini.

Hal yang sama saat ini juga tengah dikerjakan oleh Pemerintah Portugal. Bekerja sama dengan PowerLight of Berkeley mereka membangun susunan kaca yang memiliki bentuk menyerupai piring berukuran mikro. Piring-piring itu memiliki fungsi memfokuskan sinar matahari ke solar sel. Sistem ini terbukti cukup efektif untuk digunakan di area yang sempit. Untuk sementara sistem ini bisa menyalurkan setrum ke 8.000 rumah.

Sementara, Baron Paul von Maltzahn, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, mengatakan bahwa Uni Eropa sudah menggunakan dan mencanangkan pemakaian energi surya sebagai *renewable energy* pada 2020. Pada saat itu, pemakaian energi matahari di UE mencapai sekitar 20%. Di Jerman sendiri konsumsi energi surya sudah mencapai 8,5%. Padahal, dua tahun lalu persentasenya masih sekitar 1,4%.

INVESTASI KEMBALI DALAM TIGA TAHUN

Salah satu persoalan yang menghambat pengembangan pemakaian sel surya adalah mahalnya ongkos pembuatan perangnya. Matthias Raab mengakui bahwa sistem atap surya ini memerlukan investasi dalam jumlah yang besar. Tapi, katanya, hal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Sebab, dalam jangka waktu lima tahun uang yang digelontorkan itu akan kembali. Bahkan, *return of investment* dari teknologi ini ada yang hanya butuh waktu tiga tahun. Lebih dari itu, jika dilihat harga energi fosil yang setiap tahun terus merambat naik, maka solusi dari penggunaan atap surya akan menjadi sangat kompetitif.

Hal yang sama disampaikan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Jack Purwono bahwa harga energi surya memang belum sekompetitif energi fosil. Kendati begitu, secara prospektif masa depan teknologi ini sangat cerah. Hal itu dikarenakan harga minyak telah menembus angka US\$ 140 per barel. Belum lagi penerapan harga bahan bakar minyak yang mulai mengikuti pasar internasional. "Jika energi fosil sudah tidak disubsidi, maka penggunaan energi surya sangat menjanjikan," ujarnya.

Purwono juga mengatakan bahwa pada tahun 2025, pemerintah menargetkan konsumsi energi surya akan mencapai 5% atau sekitar 20 MW. Namun, hingga saat ini belum ada rencana untuk menjalin kerja sama. Jika ada investor yang akan masuk ke Indonesia, katanya, maka bisa bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara.

Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan teknologi sel surya ini. Pakar solar sel dari jurusan Fisika ITB, Wilson Wenas, pernah menyatakan bahwa total intensitas penyinaran per harinya di Indonesia mampu mencapai 4.500 watt per jam per meter persegi. Hal itu membuat negara ini tergolong kaya sumber energi matahari.

Apalagi, letaknya di daerah khatulistiwa membuat matahari di Indonesia mampu bersinar hingga 2.000 jam per tahunnya. Alhasil, teknologi ini mestinya bisa menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan dan rasional. Bukan seperti *blue energy* yang digadang-gadang bakal menjadi sumber energi alternatif, tapi justru menjadi biang kontroversi yang tak berhenti. □